PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN
ASKARA BUMI SUKOWATI
NYAWIJI MELAYANI BUMI SUKOWATI

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2024



DPMPTSP

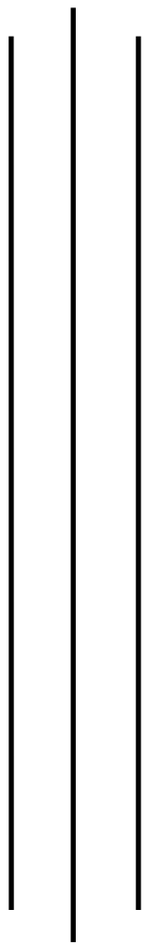
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DISUSUN TAHUN 2023

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Renja ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Renja ini dijabarkan berbagai rencana program dan kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Sragen, Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PM PTSP

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5. Penelaahan Usulan dan Program/Kegiatan Masyarakat ... 32
BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 35
3.3. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan 37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 40
4.1 Rencana Program Strategis Daerah Tahun 2024 40
4.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2024 41
BAB V PENUTUP 66

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Bagan Alur Renja SKPD	3
Gambar 1.2	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	4
Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra	11
Tabel II.2	Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan	18
Tabel II.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	36
Tabel III.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024	37
Tabel IV.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Sragen	45

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. dr.Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/1098/18/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragenh Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/2149/18/2021 tentang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 27-07-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

ttd

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Sragen;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Sragen;
5. Arsip.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

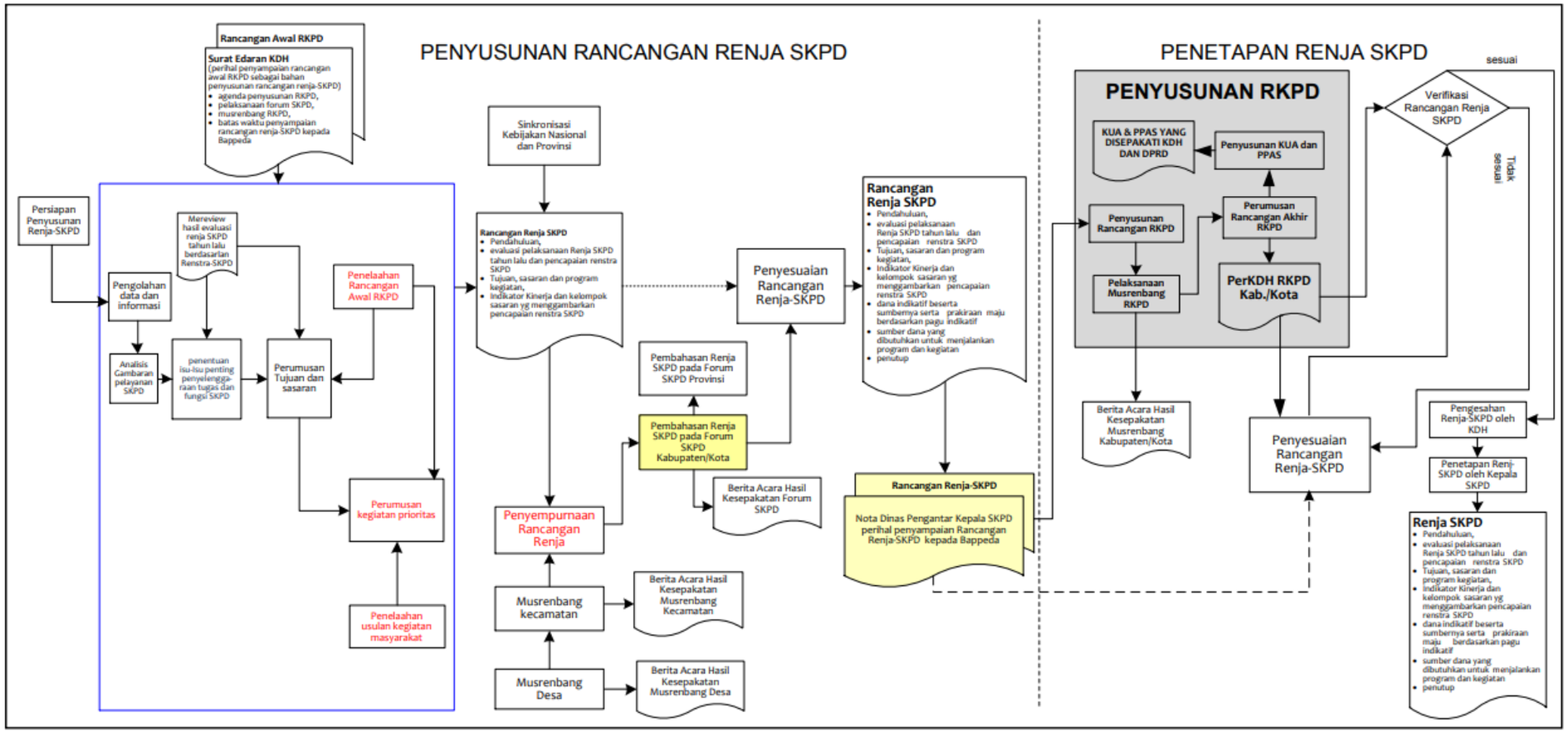
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Tahun 2023 adalah tahun kedua periode RPJMD Bupati terpilih. maka penyusunan renja sebagai dokumen perencanaan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024. Renja ini memuat program dan kegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah-arah pedoman terhadap semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2024. Renja ini disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini. sehingga nantinya rencana kerja yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kondisi eksisting. evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi renja disesuaikan dengan renstra.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

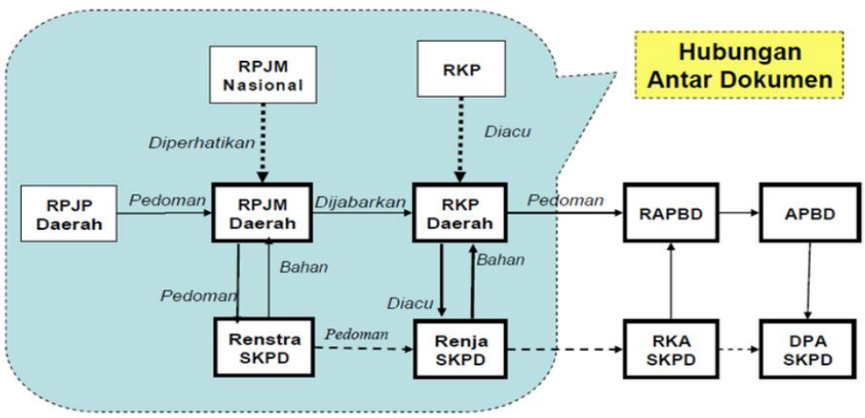
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran. target capaian program/ kegiatan. target keluaran kegiatan. total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja merupakan dokumen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana.



Gambar 1.1

Bagan alur penyusunan renja

Renja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. maka seluruh tahapan penyusunan rencana kerja dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan renja tahun 2024 didasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
j. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;

w. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

x. Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

y. Keputusan Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/2149/18/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

a. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024 yang dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2024 yang mencakup rencana capaian kinerja, untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran/ program/ kegiatan/ subkegiatan.

1.3.2 Tujuan

a. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan. berdasarkan isu-isu aktual/ strategis yang dihadapi.
c. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Latar Belakang

1.1 Landasan Hukum
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
1.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
1.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sepanjang tahun 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah melakukan beberapa kegiatan. yaitu :

1. Pelaksanaan promosi atau pameran investasi yang dilaksanakan sebanyak 2 even promosi. Pelaksanaan even promosi ini dilaksanakan di Surakarta berupa pameran investasi dan di Semarang dalam bentuk Forum Bisnis *Central Java Investment Buisness Forum* (CJIBF). Dua even tersebut adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Sragen. termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya even promosi ini diharapkan mampu membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Sragen untuk dipasarkan di luar Sragen.
2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen. juga melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan/nonperizinan. sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan yang dilakukan ke seluruh wilayah Kabupaten Sragen secara bertahap. Dengan peningkatan kegiatan-kegiatan tersebut di atas jumlah investor diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah investor pada tahun 2022 yang menanamkan investasinya sebanyak 8.077 investor. mengalami kenaikan jumlah investor dibanding tahun 2021. dimana sebagian besar investor di tahun 2022. masih didominasi dari sektor UMKM.

Namun demikian realisasi investasi tahun mengalami peningkatan sama dari tahun sebelumnya.

3. Sebagai tindak lanjut penerbitan perizinan berusaha maka dilakukan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan pemegang perizinan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan. Sepanjang tahun 2022 perizinan yang dilakukan pengawasan sebanyak 100 izin dari target 100 izin.. Pengawasan dilakukan guna meningkatkan tertib administrasi perizinan guna meningkatkan iklim investasi yang sehat. selain upaya pemantauan atas LKPM.
4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha/ pengguna layanan. dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah. khususnya aparatur pelayaan perizinan dan nonperizinan. Hsail IKM tahun 2022 adaclah 86.75 yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan **Baik** atau bernilai **B**.
5. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta untuk mempermudah akses dalam pelayanan secara *online*. selain adanya layanan OSS RBA. maka digunakan aplikasi layaan perizinan dan nonperizinan non OSS melalui SiPIONER (Sistem Perizinan Online Sragen). Selain SiPIONER. juga ada layanan aplikasi layanan melalui SiPIPO. SIMBG

Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Sragen dalam tahun pertama Renstra Tahun 2021-2026 sejumlah 5 (lima) indikator seluruhnya tercapai melebihi dari target yang ditetapkan. Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2022

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target	Capaian	%
Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	1.5	2.1	140
Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN (investor)	1.250	8.770	701

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum. kepegawaian. dan keuangan Perangkat Daerah [%]	100	100	100
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]	30	10	33
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]	20	41	205
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]	82.00	86.75	106
Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]	8	10	125
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]	30	30	100

Dari indikator tujuan/sasaran/program tersebut di atas, terdapat satu indikator program yang tidak memenuhi target 100%, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan indikator **Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun** dengan capaian 33%.

Tabel. II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja			Satuan		Target		Capaian															
Nilai realisasi penanaman modal			Rp trilyun		1.5		2.1															
Jumlah PMA PMDN			investor		1250		8777															

Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II		III		IV							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**35.374.167.000**		**3.475.286.941**		**8.392.976.870**		**681.154.441**		**2.056.717.227**		**3.475.288.431**		**7.429.858.474**		**88.52**		**10.905.145.415**		**31**
Meningkatnya investasi daerah	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**35.374.167.000**		**3.475.286.941**		**8.392.976.870**		**681.154.441**		**2.056.717.227**		**3.475.288.431**		**7.429.858.474**		**88.52**		**10.905.145.415**		**31**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian pelayanan umum. kepegawaian. dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	**100**	**28.488.367.000**	**25**	**2.798.793.490**	**100**	**7.171.444.870**	**25**	**652.725.441**	**50**	**1.764.488.227**	**75**	**2.798.794.480**	**100**	**6.248.367.911**	**100.00**	**87.13**	**125**		**125**	**32**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	60	19.582.794.000	3	2.284.524.000	12	3.519.482.353	3	3.552.954.598	6	1.475.234.176	9	2.284.524.990	14	2.890.286.337	116.67	82.12	17	5.174.810.337	28.3333	26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	125	19.582.794.000	24	2.284.524.000	25	3.519.482.353	3	3.552.954.598	24	1.475.234.176	24	2.284.524.990	24	2.890.286.337	96.00	82.12	48	5.174.810.337	38.4	26
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	9	114.520.000	1	25.892.500	1	34.520.000	1	25.892.500	1	25.892.500	1	25.892.500	1	25.892.500	100.00	75.01	2	51.785.000	22.2222	45
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut [Paket]	110	114.520.000	31	25.892.500	34	34.520.000	31	25.892.500	31	25.892.500	31	25.892.500	31	25.892.500	91.18	75.01	62	51.785.000	56.3636	45
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	60	3.404.699.000	3	285.523.382	12	2.791.918.665	3	29.993.320	6	148.536.777	9	285.523.382	12	2.609.509.367	100.00	93.47	15	2.895.032.749	25	85
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	20	218.736.000	2	12.408.000	4	31.020.245	3	5.761.000	3	7.720.000	3	12.408.000	4	29.681.000	100.00	95.68	6	42.089.000	30	19

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	32	1.352.430.000	4	92.587.000	8	2.481.226.420	3	0	4	51.868.000	4	92.587.000	19	2.316.376.000	237.50	93.36	23	2.408.963.000	71.875	178
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	20	504.798.000	2	39.203.000	4	72.798.000	3	10.344.000	2	18.962.000	3	39.203.000	4	65.037.500	100.00	89.34	6	104.240.500	30	21
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	20	738.852.000	2	71.455.800	4	121.102.000	3	0	2	30.776.000	2	71.455.800	4	112.815.800	100.00	93.16	6	184.271.600	30	25
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	5	21.758.000	2	1.710.000	1	3.600.000	3	0	1	900.000	1	1.710.000	1	3.600.000	100.00	100.00	3	5.310.000	60	24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	120	490.000.000	15	56.159.582	25	70.000.000	3	7.888.320	18	26.310.777	24	56.159.582	37	69.999.067	148.00	100.00	52	126.158.649	43.3333	26
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	5	78.125.000	1	12.000.000	1	12.172.000	3	6.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	100.00	98.59	2	24.000.000	40	31
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	9	940.408.000	0	0	2	419.654.000	0	0	0	0	0	0	2	390.628.000	100.00	93.08	2	390.628.000	22.2222	42
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	11	564.408.000	0	0	2	240.700.000	0	0	0	0	0	0	2	235.028.000	100.00	97.64	2	235.028.000	18.1818	42
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [unit]	57	376.000.000	0	0	42	178.954.000	0	0	0	0	0	0	42	155.600.000	100.00	86.95	42	155.600.000	73.6842	41
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	60	3.842.382.000	3	114.452.083	12	245.417.852	3	22.921.355	6	66.628.303	9	114.452.083	12	189.471.142	100.00	77.20	15	303.923.225	25	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	20	21.199.000	2	900.000	4	1.199.000	3	0	2	600.000	3	900.000	4	1.190.000	100.00	99.25	6	2.090.000	30	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	20	1.733.444.000	2	18.636.583	4	80.522.852	3	6.186.355	2	12.410.803	3	18.636.583	4	33.127.642	100.00	41.14	6	51.764.225	30	3
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	20	567.739.000	2	22.221.000	4	36.396.000	3	0	2	5.885.000	3	22.221.000	4	32.440.000	100.00	89.13	6	54.661.000	30	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	20	1.520.000.000	2	72.694.500	4	127.300.000	3	16.735.000	2	47.732.500	3	72.694.500	4	122.713.500	100.00	96.40	6	195.408.000	30	13

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	9	603.564.000	1	88.401.525	2	160.452.000	2	20.963.668	2	48.196.471	1	88.401.525	2	142.580.565	100.00	88.86	3	230.982.090	33.3333	38
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	43	389.000.000	14	81.026.525	15	144.000.000	3	20.963.668	14	43.911.471	15	81.026.525	19	126.416.565	100.00	87.79	29	207.443.090	67.4419	53
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	131	87.564.000	0	0	21	2.022.000	0	0	0	0	12	0	21	2.014.000	100.00	99.60	21	2.014.000	16.0305	2
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	128	127.000.000	9	7.375.000	16	14.430.000	3	0	9	4.285.000	13	7.375.000	16	14.150.000	100.00	98.06	25	21.525.000	19.5312	17
									25.00	**9.10**	**25.00**	**24.60**	**25.00**	**39.03**	**25.00**	**87.13**	**100.00**	**87.13**				
									SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**	**T**				
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**50**	**500.000.000**	**0**	**93.743.745**	**30**	**100.000.000**	**0**	**0**	**5**	**9.184.500**	**10**	**93.743.745**	**10**	**99.556.245**	**10.00**	**99.56**	**10**		**20**	**39**
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	5	500.000.000	0	93.743.745	1	100.000.000	0	0	1	9.184.500	1	93.743.745	1	99.556.245	100.00	99.56	1	193.299.990	20	39
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	5	500.000.000	0	93.743.745	1	100.000.000	0	0	0	9.184.500	1	93.743.745	1	99.556.245	100.00	99.56	1	193.299.990	20	39
									0.00	**0.00**	**0.00**	**9.18**	**0.00**	**93.74**	**0.00**	**99.56**	**33.33**	**99.56**				
									SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**				
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**25**	**1.104.000.000**	**0**	**137.301.206**	**20**	**152.000.000**	**0**	**0**	**0**	**31.465.500**	**41**	**137.301.206**	**41**	**146.162.818**	**41.00**	**96.16**	**41**		**164**	**26**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	10	1.104.000.000	0	137.301.206	2	152.000.000	0	0	1	31.465.500	1	137.301.206	2	146.162.818	100.00	96.16	2	283.464.024	20	26
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	10	1.104.000.000	1	137.301.206	2	152.000.000	0	0	1	31.465.500	1	137.301.206	2	146.162.818	100.00	96.16	3	283.464.024	30	26
									0.00	**0.00**	**0.00**	**20.70**	**0.00**	**90.33**	**0.00**	**96.16**	**205.00**	**96.16**				
									SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**STS**	**ST**				
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**84**	**2.735.927.000**	**86.75**	**248.400.000**	**82**	**531.659.000**	**86.75**	**23.429.000**	**86.5**	**155.349.500**	**87**	**248.400.000**	**86.75**	**514.125.500**	**86.75**	**96.70**	**173.5**		**206.548**	**28**

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100	2.735.927.000	80	248.400.000	100	531.659.000	80	23.429.000	90	155.349.500	100	248.400.000	100	514.125.500	100.00	96.70	180	762.525.500	180	28
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	6225	912.334.000	1219	29.298.500	1125	231.659.000	1219	6.694.000	2553	17.759.000	4302	29.298.500	11920	225.483.000	1.059.56	97.33	13139	254.781.500	211.068	28
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	2500	1.083.593.000	101	114.556.500	500	180.000.000	101	16.735.000	139	54.350.500	580	114.556.500	1364	176.928.000	272.80	98.29	1465	291.484.500	58.6	27
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	400	240.000.000	0	8.803.000	80	20.000.000	21	0	52	450.000	63	8.803.000	91	15.972.500	113.75	79.86	91	24.775.500	22.75	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	700	500.000.000	86	95.742.000	150	100.000.000	86	0	144	82.790.000	144	95.742.000	144	95.742.000	96.00	95.74	230	191.484.000	32.8571	38
									105.79	**4.41**	**105.79**	**29.22**	**105.79**	**46.72**	**105.79**	**96.70**	**105.79**	**96.70**				
									STS	**SR**	**STS**	**SR**	**STS**	**SR**	**STS**	**ST**	**STS**	**ST**				
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10**	**2.365.873.000**	**7.5**	**192.810.000**	**8**	**402.873.000**	**7.5**	**5.000.000**	**7.5**	**94.279.500**	**8**	**192.810.500**	**10**	**387.470.000**	**10.00**	**96.18**	**17.5**		**175**	**25**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100	2.365.873.000	67	192.810.000	100	402.873.000	67	5.000.000	67	94.279.500	100	192.810.500	100	387.470.000	100.00	96.18	167	580.280.000	167	25

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	300	459.000.000	0	25.614.000	60	81.000.000	0	0	17	19.014.000	86	25.614.000	60	78.142.500	100.00	96.47	60	103.756.500	20	23
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	750	1.387.873.000	0	100.601.000	280	227.873.000	0	5.000.000	64	35.470.000	160	100.601.000	288	215.370.000	102.86	94.51	288	315.971.000	38.4	23
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	500	519.000.000	30	66.595.000	100	94.000.000	30	0	48	39.795.500	135	66.595.500	100	93.957.500	100.00	99.95	130	160.552.500	26	31
									93.75	**1.24**	**93.75**	**23.40**	**93.75**	**47.86**	**93.75**	**96.18**	**125.00**	**96.18**				
									ST	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**ST**	**STS**	**ST**				
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**60**	**180.000.000**	**0**	**4.238.500**	**30**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.950.000**	**0**	**4.238.500**	**30**	**34.176.000**	**30.00**	**97.65**	**30**		**50**	**21**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	60	180.000.000	0	4.238.500	30	35.000.000	0	0	0	1.950.000	0	4.238.500	30	34.176.000	100.00	97.65	30	38.414.500	50	21
	Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah. Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	6	180.000.000	0	4.238.500	1	35.000.000	0	0	0	1.950.000	5	4.238.500	5	34.176.000	500.00	97.65	5	38.414.500	83.3333	21
									0.00	**0.00**	**0.00**	**5.57**	**0.00**	**12.11**	**0.00**	**97.65**	**100.00**	**97.65**				
									SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2022, kinerja DPMPTSP Kabupten Sragen dapat digunakan untuk mengukur/ memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024. Adapun capaian indikator pada tahun 2022 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sragen. DPMPTSP Kabupaten melalui penyusunan kebijakan penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanan danpengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan nonperizinan. Dengan peningkatan program tersebut di atas diharapkan jumlah realisasi investasi dan PMA/PMDN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Target nilai investasi tahun 2022 adalah 1,5 trilyun dengan capaian sebesar 2,1 trilyun rupiah. Jumlah investor sebanyak 8.077 dari target sebanyak 1.225 investor.

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditujukan kepada pengguna layanan/ pelaku usaha, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayaan perizinan dan nonperizinan. Hasil pelaksanaan survei adalah 86,75 dengan kategori Baik atau bernilai B.
2. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko/ *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), maka aplikasi OSS RBA digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Manfaat Penggunaan OSS RBA antara lain;

- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time.*
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

3. Selain penggunaan OSS RBA, DPMPTSP Kabupaten Sragen juga memanfaatkan aplikasi perizinan *online* dengan nama Sistem Perizinan *Online* Sragen (SI PIONER). Aplikasi SI PIONER digunakan untuk pelayanan perizinan selain yang tercantum dalam kewenangan OSS RBA. Diharapkan pula semua jenis layanan yang menjadi kewenangan DPMPTSP yang tidak diakomodasi dalam OSS RBA, dapat dilayani melalui SI PIONER.

Tabel. II.2
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	SPM	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
1	2	3	4	5		6		9		10		11		12	
1	Nilai investasi		√	2.10	trilyun rp	1.50	trilyun rp	2.1	trilyun rp	2.1	trilyun rp	1.55	trilyun rp	1.6	trilyun rp
2	Jumlah investor		√	1.735	investor	1.785	investor	6.072	investor	1.225	investor	1.313	investor	1.378	investor
3	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]			0	%	30	%	0	%	10	%	40	%	50	%
4	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]			0	%	20	%	0	%	41	%	20	%	20	%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]			82.00	poin	82.00	poin	86.50	poin	86.75	poin	86.75	poin	86.75	poin
6	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]			0	%	8	%	8	%	10	%	10	%	10	%
7	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]			0	%	30	%	0	%	30	%	40	%	50	%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk penyelenggaraan tugas dimaksudkan, DPMPTSP Kabupaten Sragen mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

Selain itu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yaitu pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Upaya peningkatan penanaman modal dilakukan melalui penerbitan kebijakan di bidang penaman modal yang meliputi;

   - Penetapan Pemberian fasilitas/ insentif di Bidang Penanaman Modal; dan
   - Pembuatan Peta Potensi Investasi.

   Diharapkan dengan kebijakan ini terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal. Upaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui peningkatan daya saing investasi daerah juga dilakukan melalui kebijakan deregulasi/ penyederhanaan peraturan di bidang investasi, baik menyangkut dissentif investasi maupun perizinan di bidang investasi.

2. Promosi Penanaman Modal

   Upaya peningkatan investasi melalui promosi investasi dan kerjasama investasi yang dilakukan dengan pihak instansi pemerintah, investor maupun pihak ketiga. Ruang promosi penanaman modal meliputi;

   - Penyusunan strategi promosi penanaman modal
   - Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Penanaman Modal

   Pelayanan Penanaman Modal merupakan upaya peningkatan pelayanan di bidang perizinan penanaman modal dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Penanaman Modal meliputi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. Dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Disisi lain Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA sesuai dengan norma. standar. prosedur. dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Melalui OSS RBA pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Dengan demikian penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik. serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, maka keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sangat diperlukan. MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Sedangkan ruang lingkup pelayanan penanaman modal ini meliputi;

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelaksanaan pemantauan. pembinaan. dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah :

a. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
b. Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini meliputi kegiatan :

a. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
b. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penananam modal.
c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penananam modal

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan aplikasi perizinan *online.* yang merupakan aplikasi pendukung OSS. digunakan untuk mendukung penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Dengan pengembangan aplikasi ini, maka seluruh kewenangan bidang perizinan/nonperizinan yang tidak terakomodasi pada OSS, juga dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan *online*. Dengan penerapan teknologi informasi. maka diharapkan hanya ada satu data dan tidak terjadi tumpang tindih seperti yang sering terjadi.

6. Isu penting lain di tahun 2024 pada Urusan Penanaman Modal adalah
   a. Rendahnya daya saing daerah;
   b. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan investasi;
   c. Belum optimalnya realisasi nilai investasi berskala nasional baik PMDN/PMA;
   d. Belum optimalnya pengawalan investasi.
   e. Pentingnya optimalisasi perlayanan terpadu dalam satu lokasi (mal pelayanan publik).
   f. Implementasi MPP Digital

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen perlu menyiapkan langkah-langkah strategis, yang akan dilaksanakan antara lain;

1. Pemangkasan alur birokrasi pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan di bidang perizinan dan investasi;
2. Peningkatan ketersediaan dokumen potensi sektor investasi, sehingga memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modal;

3. Peningkatan iklim investasi dengan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;
4. Meningkatkan promosi peluang dan potensi investasi di Kabupaten Sragen dengan mengikuti even dan forum pameran investasi;
5. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan serta mengembangkan inovasi layanan publik secara *mobile* sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna lebih meningkatkan kualitas layanan perizinan melalui OSS Berbasis Resiko (*Risk Based Aproach/ RBA)* dan peningkatan kapasitas petugas layanan;
7. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur pelayanan melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pendidikan latihan (diklat);
8. Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP);
9. Meningkatkan sosialisasi kepada investor guna meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan di bidang penanaman modal baik terkait pelaksanaan usaha maupun dalam pelaporan (LKPM);
10. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan bidang perizinan penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan;
11. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam penerapan satu pintu di bidang informasi dan data.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub Bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu: 1) membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan 3) penjelasan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024, atau program/kegiatan/subkegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda.

Penjelasan pada bagian ini belum dapat disajikan karena hingga penyusunan Renja ini, Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 hanya menyajikan matrik program/ kegiatan sedangkan subkegiatan belum ditampilkan secara rinci.

Tabel. II.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN
Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	**Indikator**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu**	**Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan**	**Indikator**	**Lokasi**	**Target**	**Pagu**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		DPMPTSP		**7.836.028.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		DPMPTSP		**6.626.000.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum. kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	100%	**5.952.028.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian pelayanan umum. kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	100%	**5.600.000.000**	
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	DPMPTSP	3 dokumen	**12.000.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	DPMPTSP	3 dokumen	**18.000.000**	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	3 Dokumen	14.000.000	
					Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	1 Laporan	4.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**3.875.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	3.200.000.000	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25Orang/bl	3.200.000.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	DPMPTSP	2 laporan	**41.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	DPMPTSP	2 laporan	**85.000.000**	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMPTSP	0	25.000.000	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	40 Orang	60.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**674.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	DPMPTSP	12 bulan	**840.000.000**	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1 Paket	80.000.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	8 Paket	240.000.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	4 Paket	120.000.000	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP	4 Paket	140.000.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan	DPMPTSP	1 Dokumen	6.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	25 Laporan	150.000.000	

					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	DPMPTSP	1 Dokumen	80.000.000	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen	DPMPTSP	1 Dokumen	24.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	DPMPTSP	2 laporan	**180.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	DPMPTSP	2 laporan	**234.000.000**	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMPTSP	4 Paket	120.000.000	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	DPMPTSP	3 unit	50.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMPTSP	28 Unit	64.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPTSP	12 bulan	**935.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPTSP	12 bulan	**1.043.000.000**	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	4 Laporan	5.000.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	4 Laporan	520.000.000	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	4 Laporan	98.000.000	

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12 bulan	420.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	2 laporan	**235.028.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	2 laporan	**180.000.000**	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	DPMPTSP	3 Unit	60.000.000	
					Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPTSP	12 Unit	120.000.000	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DPMPTSP	96 Unit	8.000.000	
					Pemeliharaan Aset Tetap L:ainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DPMPTSP	1 Unit	25.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	12 Unit	50.000.000	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DPMPTSP	28 unit	70.000.000	

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	DPMPTSP	50%	**370.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	DPMPTSP	50%	**340.000.000**	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	DPMPTSP	2 dokumen	**170.000.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	DPMPTSP	2 dokumen	100.000.000	
					Penyusunan Rencana Umum Peananaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Rencana Umum Peananaman Modal	DPMPTSP	1 dokumen	120.000.000	
					Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	1 dokumen	100.000.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi	DPMPTSP	1 dokumen	**200.000.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	jumlah penyusunan peta potensi investasi	DPMPTSP	2 dokumen	**120.000.000**	
					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	120.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	DPMPTSP	20%	**430.000.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar	DPMPTSP	20%	**150.000.000**	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi	DPMPTSP	2 kali	**430.000.000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah even promosi	DPMPTSP	2 kali	**150.000.000**	

					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	1 Dokumen	150.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	DPMPTSP	83 poin	**570.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	DPMPTSP	83 poin	535.000.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	DPMPTSP	100%	**570.000.000**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	DPMPTSP	100%	535.000.000	
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	3200 Pelaku usaha	190.000.000	
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	1100 Kegiatan usaha	200.000.000	

					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	80 orang	45.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPTSP	150 Kegiatan usaha	100.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP	10%	**484.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	DPMPTSP	10%	386.000.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP	100%	**484.000.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP	100%	386.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	150 Pelaku	292.000.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	100 Kegiatan	94.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	DPMPTSP	50%	**30.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang	DPMPTSP	40%	**30.000.000**	

						tersusun dengan baik				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan	DPMPTSP	50%	**30.000.000**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan	DPMPTSP	40%	**30.000.000**	
					Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah aplikasi Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah. Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPTSP	1 Dokumen	30.000.000	
				7.836.028.000					**6.362.960.586**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran, Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, dan perguruan tinggi. Deskripsi yang perlu disajikan antara lain: 1) penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; dan 2) penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah. masyarakat dapat mengusulkan melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Namun demikian untuk sejak tahapan penyusunan rencana kerja tahun 2024 disusun, tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka tahun 2024 program yang dijalankan sebanyak 6 (enam) program, dan kegiatan yang dijalankan sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 tertuang dalam 7 agenda pembangunan nasional, yaitu:

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) perbaikan kualitas SDM; (2) Peningkatan investasi; (3) Peningkatan produktivitas; dan (4) perbaikan pasar tenaga kerja.
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan social, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk;
d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

f. Membangun lingkungan hidup. meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
g. Memperkuat stabilitas politik, hokum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah "**Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya dengan semangat gotong royong**". Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
b. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi dan ketahanan pangan.
d. Penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
e. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema "**Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada:

a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas.
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata.
c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.
d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 berpedaoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 Tahap IV (2020 – 2025). Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalahitu **"Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah**

dan lingkungan hidup” dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagai berikut.;

Dalam rangka merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 perlu serangkaian tahapan serta memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku dan telah tersedia. yaitu:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
2) Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Nasional tahun 2024;
3) Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
5) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui kegiatan tahunan. Rencana strategis memuat target indikator kinerja tingkat sasaran srategis untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja tujuan.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut. maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2024, yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
DPMPTSP Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	**Tujuan Strategis :** Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	1.60
1.1	**Sasaran Strategis:** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/PMDN (investor)	1.378
1.2	**Sasaran Penunjang:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah (predikat)	BB (70.40)
18.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum. kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (%)	100
18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun (%)	50
18.3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar (%)	20
18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan (poin)	84.00
18.5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM (%)	10
18.6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik (%)	50

3.3. Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program/kegiatan/subkegiatan di tahun 2024 antara lain;

Tabel III.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan DPMPTSP Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3	4
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik

1	2	3	4
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik/ Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal/ Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan/ Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

1	2	3	4
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal/ Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2024 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renja. visi dan misi Kabupaten Sragn yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian dan Pelaksnaaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Renja DPMPTSP Tahun 2024 terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 34 subkegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan/subkegiatan dirumuskan indikator kinerja. Perumusan indikator juga diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen serta sumber biaya lain yang sah.

4.1. Rencana Program Strategis Daerah Tahun 2024

Program strategis Kabupaten Sragen merupakan bagian program unggulan Bupati Sragen dalam periode lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, di antaranya pengembangan UMKM dengan anggaran mencapai 10 milyar per tahun.

Berdasarkan program kegiatan tahun 2024 rencana program pengembangan UMKM yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkannya diantaranya melalui ;

a. Program promosi penanaman modal, Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu **Persentase realisasi kepeminatan investasi skala besar/menengah**. Program ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelaku umkm pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, dengan mengikutsertakan pelaku UMKM pada pameran dimaksud.
b. Program pelayanan penanaman modal, Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu **nilai IKM bidang perizinan dan nonperzinan**. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dengan sasaran kegiatan fasilitasi dan pembinaan bidang perizinan pelaku umkm.

4.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Berdasarkan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2024 pagu anggaran Dinas Penanaman Modal sebesar Rp. 6.385.722.000 yang terdiri dari Rp. 3.205.950.000 untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.197.772.000.00 untuk belanja operasional rutin dan kegiatan urusan. Secara ringkas penggunaan anggaran tersebut di atas sebagai berikut;

4.2.1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Upaya peningkatan realisasi penanaman modal yang dilakukan melalui Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi dimana bertujuan untuk penyediaan dokumen potensi investasi.

4.2.2. Promosi Penanaman Modal

Upaya peningkatan realisasi penanaman modal melalui promosi dan kerjasama yang dilakukan dengan pihak instansi pemerintah, investor maupun pihak ketiga. Ruang promosi penanaman modal melalui Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota. Salah satu sasaran kegiatan promosi adalah terkait dengan program Bupati Sragen dalam pemberdayaan UMKM, dengan mengikutsertakan pelaku UMKM dalam even pameran tersebut.

4.2.3. Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman Modal merupakan upaya peningkatan pelayanan di bidang perizinan penanaman modal dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan

Penanaman Modal meliputi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan ruang lingkup pelayanan penanaman modal ini meliputi;

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, sasaran kegiatan adalah fasilitasi perizinan bagi pelaku UMKM.
b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sasaran kegiatan berupa pemberian layanan perizinan dan nonperizinan melalui OSS dan layanan perizinan *online* serta layanan bergerak DPMPTSP ke seluruh wilayah Kabupaten Sragen.
c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, sasaran kegiatan berupa pemberian layanan konsultasi dan pengaduan atas layanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Sragen.
d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, dengan sasaran kegiatan berupa pemeriksaan lapangan perizinan dan pemantauan komitmen perizinan dan nonperizinan baik yang dilaksanakan DPMPTSP maupun instansi teknis.

4.2.4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelaksanaan pemantauan. pembinaan. dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak. kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah :

a. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
b. Melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan

tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

Sedangkan ruang lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi;

a. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha, yaitu bimbingan teknis/ sosialisasi bagi pelaku usaha terhadap implementasi dan pengawasan OSS RBA.
b. Pengawasan penananam modal yang meliputi
    a) analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
    b) inspeksi lapangan; dan
    c) evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha para Pelaku Usaha.

4.2.5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Moda

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Implementasi dari kegiatan adalah penyusunan data laporan perizinan dan nonperizinan.

Secara ringkas penggunaan anggaran tersebut sebagaimana tabel berikut;

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
18.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (%)	100	5.304.188.000
18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun (%)	50	120.000.000
18.3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar (%)	20	131.500.000
18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan (poin)	84,00	418.034.000
18.5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM (%)	10	380.000.000
18.6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik (%)	50	32.000.000
	JUMLAH			6.385.722.000

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD-RI)

Tabel IV.1
Program/ Kegiatan/Subkegiatan DPMPTSP
Kabupaten Sragen Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**6.385.722.000,00**							**6.606.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.385.722.000,00**							**6.606.000.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**5.304.188.000,00**							**5.315.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah***	**100 % 100 %**			**100 %**	**5.304.188.000,00**						**100 % 100 %**	**5.315.000.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun*	-			3 dokumen	6.938.000,00			-		-	-	12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.524.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.414.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*	-			12 bulan	3.205.950.000,00			-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualita 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-	-	3.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.205.950.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualita 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		3.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			2 laporan	58.196.000,00			-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualita 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-	-	84.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.596.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualita 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	42.600.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualita 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	-			2 bulan	628.634.000,00			-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualita 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-	-	526.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	35.570.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualita 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		68.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	268.455.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	69.630.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	96.875.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	100.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	39.104.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah laporan pengadaan barang milik daerah*	-			2 laporan	207.948.241,00			-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-	-	140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	53.340.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	154.608.241,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			12 bulan	914.714.000,00			-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-	-	965.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.994.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	450.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		480.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	78.692.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	381.028.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah*	-			2 laporan	281.807.759,00			-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-	-	388.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	59.470.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	106.840.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				57 Unit	10.461.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	18.260.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	43.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	EALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						ELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				51 Unit	43.056.759,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi& investasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**1.081.534.000,00**							**1.291.000.000,00**	
1.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun***	**50 %** **50 %**			**40 %**	**120.000.000,00**						**50 %** **50 %**	**125.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*jumlah penyusunan peta potensi investasi*	-			1 dokumen	120.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-	-	125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar***	**25 %** **25 %** **25 %** **25 %**			**20 %**	**131.500.000,00**						**25 %** **25 %** **25 %** **25 %**	**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah even promosi*	-			2 kali	131.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi& investasi	-	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	131.500.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi& investasi	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan***	**84 Poin**			**84 Poin**	**418.034.000,00**						**84 Poin**	**600.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan*	-			100 %	418.034.000,00				1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi& investasi	-	-	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				150 Kegiatan Usaha	70.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi& investasi	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1250 Pelaku Usaha	113.264.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				80 Orang	45.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				500 Kegiatan Usaha	189.770.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-		230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM***	**10 %**			**10 %**	**380.000.000,00**						**10 %**	**386.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal*	-			100 %	380.000.000,00			-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi	-	-	386.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				210 Pelaku Usaha	286.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	-		292.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				100 Kegiatan Usaha	94.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi& investasi	-		94.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik***	**60 % 60 %**			**50 %**	**32.000.000,00**						**60 % 60 %**	**30.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan*	-			50 %	32.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan apasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi& investasi	-	-	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi& investasi	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**6.385.722.000,00**							**6.606.000.000,00**	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja untuk tahun 2024. Renja ini merupakan tolok ukur untuk menentukan program/ kegiatan/ subkegiatan perangkat daerah tahun 2024.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun standar pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis.
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi serta meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif, sehingga apabila terjadi kekurangan anggaran, maka dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan diupayakan tetap dapat mendukung pencapaian target kinerja.

Rencana Kerja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam RKPD Tahun 2024 dan RENSTRA Tahun 2021-2026 tahun berkenaan.

Besar harapan kami agar dokumen renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah daerah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat

kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan rencana kerja ke depan.

Demikian Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2024 disusun dengan harapan semoga segala hal yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik demi tercapainya tujuan organisasi.

Sragen, Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001